



BPK-RI Periksa Kendaraan di Lima SKPD Kapuas Hulu

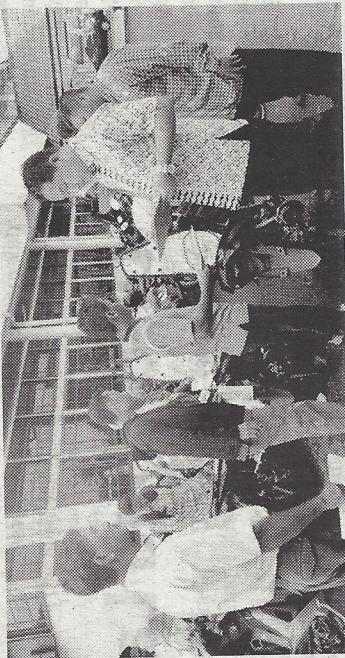
PUTUSSIBAU-RK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar memeriksa kendaraan dinas di lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kapuas Hulu.

"Sementara ini, kita belum menemukan kejanggalan pada kendaraan dinas yang diperiksa. Sejauh ini belum ada permasalahan," kata Tomi, Anggota Bagian Pemeriksaan, BPK-RI Perwakilan Kalbar ditemu di Dinas Pertanian Kapuas Hulu, Jumat (15/5) pagi.

Kelima SKPD Kapuas Hulu yang kendaraan dinasnya diperiksa itu terdiri atas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, serta Sekretariat

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu. Rahmat menyambut baik pemeriksaan kendaraan dinas tersebut. "Kalau bisa, satu tahun satu kali. Bukan hanya untuk kendaraan bermotor, tetapi juga fasilitas negara lainnya yang digunakan pegawai. Karena kami sebagai pegawai negara, kita diberi amanah harus ikut aturan," katanya.

Sementara itu, Bagian Penyimpan Barang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peteran Kapuas Hulu, Siswoyo mengungkapkan, kendaraan dinas yang diperiksa itu pengadaannya mulai 2007 hingga 2014. Untuk dinas dan penyuluhan lapangan. Kalau jumlah di dinas kita sekitar sekitar 120 unit," singkatnya. (aRm)



BPK memeriksa kendaraan dinas. ARMAN HARRAD

"Permohonan dum itu, harus diajukan ke Penda dulu, itu bisa. Asalkan sesuai prosedur, yakni setelah jangka waktum minimal lima tahun. Bupati yang memutuskan berhak atau tidak," jelas Tomi. Terpisah, salah seorang PNS di

"Permo... masing," tegas Tomi.

Kendaraan dinas tersebut, jelas Tomi, bisa saja ddum (perubahan menjadi hak milik pribadi). Namun ketentuannya, minimal kendaraan tersebut harus sudah mencapai lima tahun pemakaian.

"Nggak bisa membawa kendaraan ketika pinjrah dinas. Kalau ada, itu tugas kepala dinas yang menarik aset SKPD masing-masing, terutama kesadaran petugas